

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA
PERSIAPAN PULAU BELIMBING KECAMATAN KUOK
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

OLEH :

**M. CHALID SYAUFAN
2110843026**



DIBIMBING OLEH:

- 1. DR. RIA ARIANY, M.SI**
- 2. ROZA LIESMANA, S.IP, M.SI**

DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

ABSTRAK

M. Chalid Syaufan, 2110843026, *Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa Persiapan Pulau Belimbing Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau*, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2025. Dibimbing oleh: Dr. Ria Ariany M.Si dan Roza Liesmana S.IP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 153 halaman dengan referensi 16 buku teori dan metode, 18 skripsi dan jurnal, 8 dokumen, dan 3 website internet.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pemekaran wilayah Desa Kuok yang melahirkan Desa Persiapan Pulau Belimbing, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, percepatan pembangunan, dan pemanfaatan potensi desa secara maksimal. Pemekaran desa ini didorong oleh keinginan masyarakat yang ingin desanya dimekarkan karena pembangunan desa yang belum maksimal disebabkan keterbatasan anggaran di Desa Kuok yang memiliki wilayah dan jumlah penduduk cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemekaran desa persiapan Pulau Belimbing.

Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle yang mencakup variabel isi kebijakan dan konteks kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive sampling*, dan data dianalisis dengan model Miles dan Huberman serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Masyarakat menunjukkan tingkat penerimaan dan partisipasi yang tinggi terhadap kebijakan yang dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk mendapatkan anggaran desa yang lebih banyak untuk pembangunan desanya. Namun, tujuan jangka panjang seperti peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan anggaran. Hambatan lain juga muncul dari dinamika politik, seperti moratorium pemekaran desa selama tahun politik 2024. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pemekaran Desa Persiapan Pulau Belimbing menunjukkan progres yang positif dan berada pada jalur yang tepat menuju pembentukan desa definitif.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Pemekaran, Desa, Pulau Belimbing*

ABSTRACT

M. Chalid Syaufan, 2110843026, *Implementation of the Policy on the Expansion of the Preparatory Village of Pulau Belimbing, Kuok Sub-district, Kampar Regency, Riau Province*, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2025. Supervised by: Dr. Ria Ariany, M.Si and Roza Liesmana, S.IP, M.Si. This thesis consists of 153 pages and references 16 theoretical and methodological books, 18 theses and journals, 8 official documents, and 3 internet websites.

This study is motivated by the phenomenon of the territorial expansion of Kuok Village, which resulted in the establishment of the Preparatory Village of Pulau Belimbing. The expansion aimed to improve service effectiveness, accelerate development, and maximize the utilization of village potential. This initiative was driven by the community's desire for the village to be divided, as development in Kuok Village had not been optimal due to limited budget allocation, despite its large area and population. The study aims to describe the implementation of the expansion policy for the Preparatory Village of Pulau Belimbing.

This research applies Merilee S. Grindle's policy implementation theory, which includes two main variables: content of policy and policy context. The study uses a descriptive qualitative method, with data collected through interviews and documentation. Informants were selected using purposive sampling, and the data were analyzed using the Miles and Huberman model and validated through source triangulation.

The results show that the expansion process has been carried out in accordance with the applicable regulations. The community has shown a high level of acceptance and participation in the policy, which is driven by their desire to obtain greater village funding for local development. However, long-term goals such as improved welfare and infrastructure development have not yet been fully achieved due to budget constraints. Additional obstacles have also arisen from political dynamics, such as the village expansion moratorium during the 2024 political year. Overall, the implementation of the expansion policy for Pulau Belimbing Preparatory Village shows positive progress and is on the right track toward the establishment of a definitive village.

Keywords: Implementation, Policy, Expansion, Village, Pulau Belimbing